


## **Relevansi Birokrasi Rational Weber Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Kabupaten Belu**

**Adeo Dato J Barros Mbiri<sup>1</sup>, Dedi Supriadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Fajar Timur Atambua

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Institute Ilmu Social dan Ilmu Budaya Samawa Rea

<b>Article Info</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Article history:</b></p> <p>Article Received : 18 July 2021 Publication: 20 July 2021</p>	<p>Percepatan pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Belu merupakan sebuah kewajiban pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip nawa cita yang dicanangkan oleh presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Upaya penataan tata kelola dan layanan birokrasi menjadi salah satu alternative dalam upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Belu sekaligus menjadi solusi atas sejumlah persoalan seperti kesehatan, kemiskinan, rendahnya SDM, angka kematian ibu dan anak. Upaya meminimalisir sejumlah persoalan tersebut akan berdampak pada meningkatnya rasa nasionalisme di daerah perbatasan. Hal tersebut akan terwujud apabila birokrasi bertindak sebagai main aktor. Kendalanya adalah bawah birokrasi dalam dirinya memiliki penyakit. Sejumlah penyakit dalam tubuh birokrasi menjadi penghalang kinerja birokrasi dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu. Ada sejumlah solusi atas persoalan dalam tubuh birokrasi. Salah satunya adalah birokrasi rational Weber.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Pathologi Birokrasi, Birokrasi Rational Weber</p>	
<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>	
	
<p><b>Corresponding Author:</b></p> <p><b>Adeo Dato J Barros Mbiri</b> Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Fajar Timur Atambua Email: <a href="mailto:adeombiri@gmail.com">adeombiri@gmail.com</a></p>	

### **1. PENDAHULUAN**

Percepatan pembangunan daerah perbatasan merupakan suatu tanggungjawab pemerintah. Hal ini tertuang dalam visi dan misi pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, dalam program nawa cita point tiga yakni ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Percepatan pembangunan juga merupakan salah satu manivestasi dari tujuan negara yang tertuang di dalam alinea ke IV UUD1945.

Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah pinggiran/perbatasan telah mendapatkan sentuhan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk mendorong percepatan pembangunan pada berbagai bidang yakni pembangunan infrastruktur, penataan birokrasi dan pelayanan public, serta pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur oleh pemrintah pusat berupa pembangunan pos lintas batas Motaain, jalan sabuk merah, Bendungan Roti Klot, pembangunan ruas jalan negara. Penataan birokrasi dan layanan public dapat dilihat dalam bentuk pembangunan plaza pelayanan public. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan formal yakni pembangunan Universitas Pertahanan. Pembangunan sumber daya

manusia melalui pendidikan non formal dilakukan melalui pelatihan dan kursus, kelompok tenun, kelompok daur ulang sampah dan lain-lain.

Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu patut diapresiasi, tetapi data menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum optimal. Kurang optimalnya hasil pembangunan di Kabupaten Belu dapat dilihat dalam sejumlah permasalahan sebagai berikut: angka kematian ibu dan anak berdasarkan data yang di dapat dari dinas Kesehatan kabupaten belu, pada tahun 2016 terdapat 4 kasus kematian, 2017 terdapat 6 kasus dan di tahun 2019 kematian bayi berjumlah 71 orang dan ibu 5 orang. Jumlah bayi gizi buruk dari jumlah 14.000 balita di kabupaten Belu, terdapat 3.900 balita yang terpapar gizi buruk dengan kategori bayi yang pendek dan sangat pendek berdasarkan riseksdas. Rendahnya kualitas guru di Kabupaten Belu sebagaimana tercatat 1.600 guru di belu yang belum mendapatkan gelar pendidikan strata 1 (S1) padahal gelar strata 1 sebagai salah satu persyaratan seseorang menjadi guru.

Rendahnya hasil pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang turut berpengaruh adalah rendahnya layanan birokrasi sebagai aparatur pemerintah dalam menghadirkan layanan public. Kehadiran birokrasi sebagai aparatur yang menghadirkan secara langsung layanan pemerintah dalam bentuk administrasi, barang dan jasa sering menghadirkan persoalan dalam sikap memberikan layanan seperti kurang disiplin, tidak bersikap rasional dan proporsional, impersonal, layanan yang lamban, apatis, gagap teknologi, sistem yang kaku dan lain-lain. Layanan birokrasi yang mengandung penyakit mempengaruhi hasil pembangunan yakni menciptakan persoalan social sebagaimana disebutkan di atas.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh birokrasi dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran khususnya daerah perbatasan Kabupaten Belu. Konsentrasi penelitian ini adalah birokrasi sebagai aparatur yang menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada birokrasi rasional Max Weber

### **1.1. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Belu

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah birokrasi di Kabupaten Belu. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Penulis melakukan analisis data berdasarkan fakta riil di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori birokrasi rasional Weber.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Karangka Pikir Birokrasi Weber**

Birokrasi menurut Weber adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Weber mengemukakan tiga tipologi birokrasi yakni legitimasi karismatik, legitimasi tradisional dan legitimasi rasional.

Weber merumuskan beberapa hal sebagai sebuah pra syarat birokrasi sebagai seorang aparatur pemerintah sebagai berikut: 1) Kerja ketat pada peraturan (*rule*) 2) Tugas khusus (spesialisasi) 3) Kaku dan sederhana (*zakelijk*) 4) Penyelenggaraan secara resmi (formal) 5) Pengaturan dari atas ke bawah (hierarkis), 6) Pembuatan dan pengambilan keputusan Berdasarkan logika (rasional), 7) Terpusat (berdasarkan otoritas) 8) Taat dan patuh (*obedience*) 9) Disiplin (*dicipline*) 10) Terstruktur atausistematis 11) Tidak pandang bulu (impersonal)

Pembangunan daerah perbatasan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen baik politik, birokrasi, ekonomi, teknologi, pertanian, peternakan, infrastruktur dan lain-lain. Salah satu elemen yang sangat urgen adalah birokrasi. Birokrasi yang dimaksud adalah sekelompok orang

yang berkerja pada kantor pemerintahan (Albrow). Tujuannya adalah menghadirkan layanan kebutuhan masyarakat dalam bentuk administrasi, barang dan jasa.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Pathologi Birokrasi Kabupaten Belu

Persoalan yang ditemukan dalam layanan birokrasi yang menghambat adanya gerak pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu adalah sikap layanan birokrasi. Sikap perilaku birokrasi dalam memberikan layanan (*social action*) menurut Weber: *affective, traditional, value rational and instrumentally rational*. (Setiyono, 2004: 47-49).

Sikap perilaku layanan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan berbagai persoalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi perbatasan (daerah 3 T) dan juga Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Demokratik Timor Leste. Fakta yang dapat diamati adalah tingginya angka kemiskinan, rendahnya pembangunan indeks kemanusiaan, Persoalan kesehatan, rendahnya daya serap anggaran, rendahnya pembangunan infrastruktur, rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Pemicu terjadinya sejumlah persoalan di atas salah satunya adalah sikap layanan birokrasi di Kabupaten Belu. Sikap layanan birokrasi yang tidak sehat yang membuat birokrasi berpenyakit (*bureau pathologi*)/pathologi birokrasi adalah sikap afektif, tradisional, impersonal, dan formalitas. Sikap afektif sering dijumpai dalam bentuk layanan birokrasi berdasarkan pada sikap rasa, rasa suka karena satu klan, rasa segan karena keluarga pimpinan, rasa simpati karena satu pilihan politik, rasa antipati karena lawan politik. Layanan sering diberikan tanpa pertimbangan rational, berdasarkan aturan dan prosedur. Layanan berdasarkan pada sikap afektif membuat birokrasi tampil sebagai tuan atau budak.

Sikap tradisonal yang dimaksud adalah sikap layanan birokrasi yang dijalankan secara terus menerus sehingga membudaya walaupun tidak rational. Ciri yang dapat diamati adalah, hormat secara berlebihan pada atasan sehingga menempatkan atasan sebagai pihak yang selalu benar, sikap menerima apa adanya walaupun keputusan yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rational seperti sikap balas jasa, sikap atur damai.

Sikap impersonal merupakan sikap tidak membedakan urusan pribadi dengan urusan public. Persoalan pribadi di keluarga, masyarakat berlanjut pada urusan pelayanan. Birokrasi cenderung menghambat pelayanan karena persoalan hubungan pribadi yang renggang, pilhan politik dan lain-lain. sikap impersonal ini hampir sejalan dengan sikap mix yang dikemukakan oleh Riggs; birokrasi tidak membedakan mana urusan pribadi dengan urusan kantor. Barang kantor dibawa ke rumah, barang kantor digunakan untuk kepentingan kelompok, pribadi, keluarga dan lain-lain.

Sikap formalitas yakni sikap lebih mengutamakan urusan formal seperti upacara dan mengesampingkan kinerja. Waktu dan tenaga dan perhatian birokrasi lebih dialokasikan pada upacara dan kegiatan formal daripada kerja nyata. Hal ini jelas mempengaruhi lajunya pertumbuhan pembangunan disegala dbidang di wilayah kabupaten Belu.

Sejumlah sikap birokrasi yang menghambat layanan public dalam bentuk administrasi, barang dan jasa sebagai penyakit birokrasi (*bureau pathologi/pathologi birokrasi*) di Kabupaten Belu menjadi persoalan yang perlu sentuhan dari bidang ilmu. Jalan keluar yang dapat dietempuh adalh menerapkan birokrasi rational Weber. Birokrati ratioanal Weber yang ditawarkan peneliti adalah beberapa buah pikiran Weber yang dianggap relevan. Peneliti tidak mengutip semua buah pikiran Weber tentang birokrasi tetapi penulis hanya mengambil beberapa buah pikiran yang dapat berguna untuk menjawab persoalan *pathologi* birokrasi di Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan pada beberapa instansi pemerintahan Kabupaten Belu penulis menemukan adanya sejumlah perilaku birokrasi yang tidak sejalan

dengan apa yang digariskan Weber. Beberapa hal yang paling mencolok adalah pada point 'berdasarkan logika, disiplin dan impersonal'. Kerja birokrasi masih mengedepankan kekuasaan. Pemberian layanan masih bersifat tradisional. Pimpinan ditempatkan sebagai pribadi yang selalu benar, anti kritik, dan menjadi tolak ukur dalam layanan. Maksud pimpinan menjadi tolak ukur dalam layanan adalah segala keputusan tidak berdasarkan pada aturan, kesepakatan tetapi disesuaikan dengan waktu pimpinan.

Pada point disiplin, dapat diamati melalui masuk kantor dan meninggalkan kantor pada waktunya, yakni berdasarkan aturan jam kantor yang telah ditetapkan, meutamakan pelayanan pada jam kantor. Fakta yang ditemukan adalah para pegawai sering terlambat, meninggalkan kantor lebih awal untuk urusan pribadi. Point impersonal (tanpa pandang bulu) pelayanan masih berpihak kepada kedekatan suku, hubungan keluarga dan kedekatan pribadi.

Sikap birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak dilandasi pertimbangan rasional. sikap yang muncul adalah sikap afektif. *Affective* merupakan perilaku atau tindakan yang dikendalikan oleh emosi. Apabila birokrasi dihadapkan pada tuntutan pelayanan maka sikap yang ditunjukkan adalah luapan kemarahan, emosi, kesedihan. Hal yang dapat diamati adalah apabila birokrat sedang dalam suasana gembira maka segala layanan akan mudah dan cepat. Tetapi apabila birokrat sedang dalam suasana sedih atau marah karena persoalan tertentu maka pelayanan akan menjadi rumit. Bahkan masyarakat disuruh pulang tanpa dilayani.

Permasalahan lain dalam perilaku birokrasi di Kabupaten Belu dalam birokrasi adalah perilaku tradisional. Sikap tradisional atau *traditional action* adalah tindakan yang dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung seringkali menjadi pedoman yang kurang disadari. Apalagi kebiasaan-kebiasaan itu sudah melembaga, diyakini dan dijalankan secara rutin oleh masyarakat. Akibatnya kesesakan yang sama dilakukan secara berulang dan diwariskan. Layanan pada birokrasi sulit berubah, lamban dan tidak up date

Sikap perilaku birokrasi yang tidak rasional dalam memberikan layanan public menjadikan birokrasi Kabupaten Belu sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang dibenci dan dirindu. Birokrasi dirindu masyarakat karena birokrasi merupakan *condition sine qua non*, sesuatu yang mutlak ada, demi menghadirkan pelayanan public. Tetapi disatu sisi birokrasi dibenci karena sikap dalam memberikan layanan yang dijalankan oleh birokrasi tidak sesuai harapan masyarakat. Birokrasi mengandung penyakit di dalam dirinya yang disebut dengan *bureaupathologi* (patologi birokrasi) ciri yang dapat diamati adalah impersonal, menjadi alat politik, tidak berdasarkan pada hukum, aturan dan prosedur.

Munculnya pathologi birokrasi dalam layanan public menghambat percepatan pembangunan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui aparturnya, sikap apatis, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. hal ini memunculkan persoalan social seperti tingginya angka gizi buruk, stunting, kematian ibu dan anak dan lain-lain.

## 5. SIMPULAN

Weber mengemukakan tiga tipologi birokrasi yakni tipologi karismatik, tipologi tradisional dan tipologi rasional. dari ketiga tipologi birokrasi di atas tipologi birokrasi rasional dianggap sebagai tipologi birokrasi yang paling ideal untuk pembangunan sebuah negara. Kritik yang sering dilontarkan oleh para pemerhati ilmu birokrasi lainnya adalah tipologi birokrasi rasional dianggap rumit dan sulit dicapai. Tetapi pada prinsipnya tipologi ini dijadikan sebagai alat ukur dan patokan untuk pembangunan daerah perbatasan kabupaten belu pada khususnya dan bangsa inonesia pada umumnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Belukab.go.id timexkupang.com 15/02/21www.nttonlinenow.com 2020/11/05
- Dwiyanto, Agus Dkk. 2002 Reformasi Birokerasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada .
- Fukuyama, Francis 2005 memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan tata dunia Abad 21, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamirul, 2017, Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional Otoritas:Jurnal Ilmu Pemerintahan7(1),April 2017,  
<http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/02/07/tiga-tahun-terakhir-angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-belu-meningkat/>
- <https://regional.inews.id/berita/jalan-lintas-timor-tertimbun-longsor-warga-belu-terisolasi>
- <https://www.antaraneews.com/berita/991788/pemkab-belu-segera-tangani-3900-anak-terkena-gizi-buruk>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529182621-20-56604/ribuan-guru-di-belu-belum-bergelar-sarjana>
- Osborne, David and Peter Plastrik. 1992. Banisbing Bureaucracy, New York: Addison wesley PuBLISING Company, inc.
- Riggs, Fred W.1996. Administrasi Negara-negara Berkembang Teori Masyarakat Transisi, judul aslinya Administration in developing countries, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim Penerjamaah YosagamaJakarta,PT.Raja GrafindoPersada,1996
- Triantoro, Bambang Wicaksono, Citizen Charter dan Reformasi Birokrasi,Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol.8 No.2, November 2004.